



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)

Jalan Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telp. (0272) – 321046 Facsimile 322567, Telex 325367 K L A T E N

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. BPKD Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. BPKD terletak

di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten atau lebih dikenal sebagai kompleks Pemda Klaten yang beralamatkan di Jalan Pemuda 294 Klaten.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Isu-isu strategis sebagai identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah yang masih rendah.
2. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang masih rendah dengan ketergantungan terhadap dana dari pusat yang tinggi.
3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah belum mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pencatatan aset daerah belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, demikian pula untuk belanja daerah masih banyak pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan.

4. Masih adanya kesalahan dalam penganggaran, sebagai akibat kesalahan perencanaan dan kurang akuratnya perhitungan kebutuhan anggaran yang diperlukan.
5. Masih banyaknya aset tanah pemda yang belum bersertifikat.
6. Capaian realisasi anggaran (belanja daerah) yang cenderung menurun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 BPKD Kabupaten Klaten disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada BPKD Kabupaten Klaten.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah :

- 1 Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020; dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja BPKD Kabupaten Klaten.

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BPKD KABUPATEN KLATEN

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2017 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Tahunan Tahun 2016, 2017 dan pencapaian terhadap target akhir pada BPKD Kabupaten Klaten, sebagai berikut :

Sasaran / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran / Program (Outcome)	Target			Realisasi			Capaian		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
		Target	Target		Realisasi	Realisasi		%	%	
1	2	3	4		5	6		7	8	
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	100	100	100
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	17.61	50.30	7,24	17.61	50.30	7,61	100	100	105
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	3	3	3	3	3	3	100	100	100
	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	6	6	6	6	6	6	100	100	100
	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100
	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	51.6	51.6	52,5	51.6	51.6	53,09	100	100	101
	Persentase penyerapan belanja daerah	85.0	81.0	82,00	85.0	81.0	87,33	100	100	107

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Tujuan merupakan hasil akhir (*results*) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan kemana tujuan (*destination*) yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah **meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah**.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai BPKD Kabupaten Klaten adalah **meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah**

3. Indikator dan Target Kinerja Yang Akan Dicapai Serta Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Perubahan) BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2019

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2020
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP

2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SERTA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04 - 4.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		100%	1.514.000.000			100%	1.559.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	banyaknya surat/SPj	BPKD Kab	900 surat	5.000.000	DAU	BPKD Kab	900 surat	5.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	banyaknya jenis langganan	BPKD dan GOR Gelarsena	3 jenis	210.000.000	DAU	BPKD dan GOR Gelarsena	3 jenis	210.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	banyaknya THL	BPKD Kab	4 orang	55.000.000	DAU	BPKD Kab	4 orang	55.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	banyaknya jenis ATK	BPKD Kab	49 jenis	80.000.000	DAU	BPKD Kab	49 jenis	80.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	banyaknya jenis cetak dan penggandaan	BPKD Klaten	11 jenis	100.000.000	DAU	BPKD Klaten	11 jenis	100.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	banyaknya jenis komponen alat listrik	BPKD Klaten	7 jenis	20.000.000	DAU	BPKD Klaten	7 jenis	20.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	frekuensi rapat; jumlah jam lembur;	BPKD Kab	100 kali ; jam ;	200.000.000	DAU	BPKD Kab	100 kali ; jam ;orang	200.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi perjalanan dinas	Seluruh Indonesia	100 kali	300.000.000	DAU	Seluruh Indonesia	100 kali	300.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi perjalanan dinas	Kab Klaten	75 kali	40.000.000	DAU	Kab Klaten	75 kali	40.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	banyaknya THL pengaman kantor	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000	DAU	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.21	Penyediaan jasa pengemudi kantor	Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000	DAU	GOR Gelarsena	2 orang	32.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan	banyaknya jenis peralatan kebersihan	BPKD Kab	23 jenis	15.000.000	DAU	BPKD Kab	23 jenis	15.000.000

4.04 - 4.4.0101 - 1.26	Asuransi gedung kantor dan rumah dinas	banyaknya gedung/rumah dinas	Kab Klaten	21 unit	200.000.000	DAU	Kab Klaten	22 unit	220.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.27	Asuransi Kendaraan Dinas	banyaknya mobil dinas	Kab. Klaten	63 unit	225.000.000	DAU	Kab. Klaten	64 unit	250.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sesuai yang dianggarkan		100%	3.590.000.000			100%	1.385.000.000
4,04-4.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	BPKD Kab	71 unit (1 roda 4, 70 roda 2)	2.030.000.000	DAU	BPKD Kab	0	0
4,04-4.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan kantor	BPKD Kab	30 unit	300.000.000	DAU	BPKD Kab	20 unit	200.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	banyaknya mebeleur yang dibeli	BPKD Kab	20 unit	300.000.000	DAU	BPKD Kab	15 unit	200.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	banyaknya unit gedung yang dipelihara	BPKD Kab	1 unit	100.000.000	DAU	BPKD Kab	1 unit	110.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	BPKD Kab	90 unit	500.000.000	DAU	BPKD Kab	95 unit	550.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dibeli	BPKD Kab	100 unit	90.000.000	DAU	BPKD Kab	100 unit	100.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	BPKD Kab	6 jenis	20.000.000	DAU	BPKD Kab	6 jenis	25.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan	GOR Gelarsena	8 orang	200.000.000	DAU	GOR Gelarsena	8 orang	150.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.48	Penataan Arsip Kantor	banyaknya ruang arsip yang ditata	BPKD Kab	1 ruang	25.000.000	DAU	BPKD Kab	1 ruang	25.000.000
4.04.01.02.49	Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk	Jumlah Panggung Baliho dan Spanduk yang dipelihara	BPKD	15 lokasi/ titik	25.000.000		BPKD	15 lokasi/ titik	25.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP yang diperoleh instansi		60	15.000.000			60	15.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab	1 dokumen	15.000.000	DAU	BPKD Kab	1 dokumen	15.000.000

4.04 - 4.4.0101 - 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Kenaikan PAD		7,44	12.445.200.000			7,54	12.674.700.000
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran		2				2	
		Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir		5				5	
		Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan		Tepat waktu				Tepat waktu	
		Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat		53,5				53,9	
		Prosentase penyerapan belanja daerah		84,0				85,0	
4.04 - 4.4.0101 - 15.2	Penyusunan standar satuan harga	banyaknya jenis dokumen	BPKD Kab	2 dokumen	375.000.000	DAU	BPKD Kab	2 dokumen	375.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	banyaknya sisdur/SIM keuangan daerah	BPKD Kabupaten Klaten	Terselenggaranya min 2 kali pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, 2 orang (THL), 1 unit (cloud) dan pengelolaannya, 1 dokumen (perubahan kebijakan akuntansi), 51 unit/SKPD (pendampingan pengelolaan keuangan), 2 kali (pendampingan BPKP)	500.000.000,00	DAU	BPKD Kabupaten Klaten	Terselenggaranya min 2 kali pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, 2 orang (THL), 1 unit (cloud) dan pengelolaannya, 1 dokumen (perubahan kebijakan akuntansi), 51 unit/SKPD (pendampingan pengelolaan keuangan), 2 kali (pendampingan BPKP)	550.000.000,00

4.4.01.15.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya penyusunan Perda ttg APBD TA 2021	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	605.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	615.000.000
4.4.01.15.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perbup ttg Penjabaran APBD TA 2021	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	115.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	2 dokumen	118.000.000
4.4.01.15.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda ttg Perubahan APBD TA 2020	BPKD Kab Klaten	2 Dokumen	605.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	2 Dokumen	615.000.000
4.4.01.15.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perbup ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	BPKD Kab Klaten	4 Dokumen	155.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	4 Dokumen	158.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	BPKD Kabupaten Klaten	3 Dokumen	420.000.000,00	DAU	BPKD Kabupaten Klaten	3 Dokumen	480.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	banyaknya jenis dokumen pertanggungjawaban APBD	BPKD Kabupaten Klaten	2 Dokumen	70.000.000,00	DAU	BPKD Kabupaten Klaten	2 Dokumen	80.000.000,00
4.04 - 4.4.0101 - 15.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	frekuensi diklat/bintek	Kab Klaten	0	0	DAU	Kab Klaten	0	0
4.4.01.15.21	Penelitian DPA-SKPD	Terlaksananya penelitian DPA SKPD	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	85.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	85.000.000
4.4.01.15.22	Penelitian DPA-SKPD Perubahan	Terlaksananya penelitian DPA Perubahan SKPD	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	85.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	85.000.000
4.4.01.15.23	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.	Terlaksananya penyusunan SPD	BPKD Kab Klaten	156 BENDEL SKPD	35.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	156 BENDEL SKPD	40.000.000
4.4.01.15.27	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyusunan anggaran kas Pemda	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	30.000.000	DAU	BPKD Kab Klaten	61 SKPD	35.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.28	Penerbitan SP2D	banyaknya bendel SP2D	BPKD Kab	8.000 bendel	350.000.000	DAU	BPKD Kab	8.000 bendel	320.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.29	Pengelolaan Administrasi Kasda	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab	12 kali	140.000.000	DAU	BPKD Kab	12 kali	150.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.30	Pengelolaan Administrasi Gaji	banyaknya daftar gaji yg tercetak	BPKD Kab	72.000 bendel	185.000.000	DAU	BPKD Kab	72.000 bendel	190.000.000

4.04.01.15.31	Pendataan Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan serta jumlah formulir BPHTB dan SPTPD	BPKD	15 Kali pendataan, cetak formulir BPHTB 1.500 formulir dan 1000 formulir SPTPD	400.000.000	DAU	BPKD	12 Kali pendataan, cetak formulir	400.000.000
4.04.01.15.32	Pemutakhiran Data Pajak Daerah	Jumlah THL dan Frekuensi updating data Wajib Pajak	BPKD	THL 10 orang , 12 Bulan	300.000.000	DAU	BPKD	THL 10 orang , 12 Bulan	300.000.000
4.04.01.15.33	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah SKPD dan SPPT PBB yang dicetak	BPKD	600.000 SPPT PBB dan 45,000 SKPD	460.000.000	DAU	BPKD	600.000 SPPT PBB dan 35,000 SKPD	460.000.000
4.04.01.15.34	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)	Frekuensi penyuluhan Pajak Daerah dan pelayanan pajak daerah	BPKD	30 kali	170.000.000	DAU	BPKD	12 kali penyuluhan pajak & PBB di	170.000.000
4.04.01.15.35	Pemungutan pajak daerah	Frekuensi pemungutan pajak daerah tahun 2018	BPKD	15 Kali , 12 bulan	80.000.000	DAU	BPKD	12 Kali , 12 bulan	80.000.000
4.04.01.15.36	Pemeriksaan Pajak Daerah	Frekuensi pemeriksaan pajak daerah	BPKD	12 Kali , 12 bulan	100.000.000	DAU	BPKD	12 Kali , 12 bulan	100.000.000
4.04.01.15.37	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah	Frekuensi penyampaian ketetapan pajak daerah	BPKD	12 kali (45,000 lembar ketetapan)	250.000.000	DAU	BPKD	12 kali (40,461 lembar ketetapan)	250.000.000
4.04.01.15.38	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah THL pajak Gol C, cetakan STTS/BPS PBB dan jenis hadiah wajib pajak daerah non PBB	BPKD	9 orang THL dan Cetakan STTS 9.160 lembar serta 18 kali kegiatan intensifikasi	1.100.000.000	DAU	BPKD	9 orang THL dan Cetakan STTS	1.100.000.000
4.04.01.15.39	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah	Jumlah jenis hadiah wajib pajak PBB	BPKD	7 jenis hadiah Wajib Pajak PBB	1.008.200.000	DAU	BPKD	- 7 jenis hadiah Wajib Pajak PBB	1.008.200.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.40	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD	frekuensi pembinaan	BPKD Kab	2 kali	200.000.000	DAU	BPKD Kab	2 kali	200.000.000
4.04.01.15.42	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame	Frekuensi Penertiban reklame	BPKD	50 Kali, 12 Bulan	60.000.000	DAU	BPKD	48 Kali, 12 Bulan	60.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.43	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan	banyaknya peraturan bupati	BPKD Kab	2 perbup	70.000.000	DAU	BPKD Kab	2 perbup	75.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.44	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan	frekuensi rapat/sosialisasi	BPKD Kab	2 kali	60.000.000	DAU	BPKD Kab	2 kali	60.000.000
4.04.01.15.45	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	BPKD	12 kali rapat 20 kali koordinasi/ konsultasi	180.000.000	DAU	BPKD	12 kali rapat 20 kali koordinasi/ konsultasi	180.000.000

4.04 - 4.4.0101 - 15.46	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten	frekuensi pengelolaan	BPKD Kab	12 kali	130.000.000	DAU	BPKD Kab	12 kali	140.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.47	Rekonsiliasi Aset Daerah	banyaknya unit pengelola barang	Kab Klaten	101 unit	280.000.000	DAU	Kab Klaten	101 unit	280.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.48	Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya Unit Pengelola Barang	Kab Klaten	404 unit	1.750.000.000	DAU	Kab Klaten	404 unit	1.750.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.49	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten	banyaknya sertifikat tanah	Kab Klaten	15 sertifikat	500.000.000	DAU	Kab Klaten	20 sertifikat	600.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.50	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah	banyaknya SPPT PBB	BPKD Kab	244 lembar	35.000.000	DAU	BPKD Kab	244 lembar	35.000.000
4.04.01.15.51	Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA	Banyaknya sistem yang dipelihara/ dikembangkan	BPKD	1 Aplikasi	150.000.000	DAU	BPKD	1 Aplikasi	150.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.52	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah	banyaknya pengurus barang	BPKD Kab	218 pengurus barang	750.000.000	DAU	BPKD Kab	218 pengurus barang	750.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.54	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah	banyaknya jenis dokumen/laporan	BPKD Kabupaten Klaten	1 Dokumen	160.000.000,00	DAU	BPKD Kabupaten Klaten	1 Dokumen	175.000.000,00
4.04.01.15.55	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga	Banyaknya Aplikasi yang dikelola	BPKD	1 Aplikasi	120.000.000	DAU	BPKD	1 Aplikasi	120.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.58	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	frekuensi pengelolaan keuangan daerah	BPKD Kab	12 kali	270.000.000	DAU	BPKD Kab	12 kali	280.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.59	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)	banyaknya buku	BPKD Kab	300 buku	150.000.000	DAU	BPKD Kab	300 buku	150.000.000
4.04.01.15.60	Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Frekuensi pengelolaan piutang pajak daerah terutama PBB P2	BPKD	12 kali	100.000.000	DAU	BPKD	12 kali	100.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.64	Pengelolaan Data Keuangan Daerah	banyaknya jenis data yang dikelola	BPKD Kabupaten Klaten	1 Kali	65.000.000,00	DAU	BPKD Kabupaten Klaten	1 Kali	75.000.000,00
4.04.01.15.65	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dan Jenis Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang dikembangkan	BPKD	3 Jenis Sistem (Sistem BPHTB, PBB, SIG)	320.000.000	DAU	BPKD	3 Jenis Sistem (Sistem BPHTB, PBB, SIG)	320.000.000

4.04.01.15.66	Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Frkwensi Monitoring Pengelolaan Pendapatan	BPKD	12 kali	150.000.000	DAU	BPKD	12 kali	150.000.000
4.03 - 4.4.0101 - 27	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun sesuai aturan		100%	10.000.000			100%	10.000.000
4.03 - 4.4.0101 - 27.3	Monitoring, evaluasi dan pengendalian	frekuensi rapat koordinasi	BPKD Kab	4 kali	10.000.000	DAU	BPKD Kab	4 kali	10.000.000
Jumlah					17.574.200.000				15.643.700.000

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKD Kabupaten Klaten disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan

Klaten, Januari 2019
KEPALA BPKD KAB. KLATEN

